



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 236 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan arahan, petunjuk dan pendampingan bagi setiap PD/Unit Kerja dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui kegiatan verifikasi dan validasi terhadap data pendukung yang ada pada PD/Unit Kerja.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Juli 2022

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Pdt. SEKRETARIS DAERAH,  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 236 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 6 Juli 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. PENGARAH</b>			
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan mengenai pembangunan zona integritas; b. menetapkan tujuan dan target perangkat daerah yang menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; c. memastikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai unit kerja prioritas menuju WBK/WBBM.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Dr. David B.W. Pandie, MS/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 bidang keahlian Pemerintahan dan Organisasi		

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>II. TIM KERJA</b>			
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	<p>a. Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemprov NTT;</p> <p>b. Mengusulkan PD terpilih kepada TIM kepada Tim Penilai Zona Integritas untuk ditetapkan sebagai Calon Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemprov NTT kepada Ketua pada Tim Pengarah;</p>
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemprov NTT;</p> <p>b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemprov NTT kepada ketua Tim Pelaksana;</p>
<b>a. Pokja Manajemen Perubahan</b>			
1.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	<p>1. Membantu tugas-tugas ketua tim penanggung jawab di area Manajemen Perubahan;</p> <p>2. Melakukan koordinasi pendampingan kelompok kerja pada area Manajemen Perubahan di unit kerja prioritas;</p>

			<p>3. Melakukan monev dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area Manajemen Perubahan di unit kerja prioritas;</p> <p>4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas pada ketua tim Kerja.</p>
2	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan pada BPSDMD Provinsi NTT	Anggota	<p>1. Melakukan pendampingan teknis Pelaksanaan Pembangunan ZI area Manajemen Perubahan kepada unit kerja prioritas ZI;</p> <p>2. Melakukan validasi data dukung pada area Manajemen Perubahan dari unit kerja prioritas ZI;</p> <p>3. Membuat laporan hasil kerja dan melaporkannya kepada ketua Pokja.</p>
3	Ronald Philips Letor, STTP, MPA, /JF. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
4	Kasubag Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
5	Theresia F. Gelok, SE. MM/ Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
6	Anderias Vitalis Laer, S.Sos /Analis Data dan Informasi pada BKD Provinsi NTT		
7	Vitarianda Angelina Taka, S. STP/Analis Perencanaan SDM Aparatur pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT		
8	Nifni Oktafia Sutriana Adu, S.AB/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
<b>b. Pokja Penataan Tatalaksana</b>			
1	Kepala Bidang <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<p>1. Membantu tugas-tugas ketua tim penanggung jawab di area Penataan Tatalaksana;</p> <p>2. Melakukan koordinasi pendampingan kelompok kerja pada area Penataan Tatalaksana di unit kerja prioritas;</p> <p>3. Melakukan monev dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area Penataan Tatalaksana di unit kerja prioritas;</p> <p>4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas pada ketua tim Kerja.</p>

2	Kepala Bidang layanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan teknis Pelaksanaan Pembangunan ZI teknis area Penataan Tatalaksana kepada unit kerja prioritas ZI;</li> <li>2. Melakukan validasi data dukung pada area Penataan Tatalaksana dari unit kerja prioritas ZI;</li> <li>3. Membuat laporan hasil kerja dan melaporkannya kepada ketua Pokja.</li> </ol>
3	Benyamin I. A. Balukh, S. Kom /JF. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
4	Peatriks Nomleni, S.Kom. / JF. Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
5	Halimah Abdullah, SE/ Analis Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
6.	Elscha Lyani Chintia Klaas, S.Kom/Ahli Pranata Komputer Pratama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

**c. Pokja Penataan Sumber Daya Manusia**

1	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas-tugas ketua tim penanggung jawab di area Pokja Penataan Sumber Daya Manusia;</li> <li>2. Melakukan koordinasi pendampingan kelompok kerja pada area Pokja Penataan Sumber Daya Manusia di unit kerja prioritas;</li> <li>3. Melakukan monev dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area Pokja Penataan Sumber Daya Manusia di unit kerja prioritas;</li> <li>4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas pada ketua tim Kerja.</li> </ol>
---	--	-------	---

2	Nafitalia Anu Taka, SSTP, M.Si/Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan teknis Pelaksanaan Pembangunan ZI teknis area Pokja Penataan Sumber Daya Manusia kepada unit kerja prioritas ZI;</li> <li>2. Melakukan validasi data dukung pada area Pokja Penataan Sumber Daya Manusia dari unit kerja prioritas ZI;</li> <li>3. Membuat laporan hasil kerja dan melaporkannya kepada ketua Pokja.</li> </ol>
3	Marsella Alpiony M. Bilik, S.Sos./Analisis Sumberdaya Aparatur Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
4	Ardi Arizon Koreh, SE,M.M., / JF. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
5	Yohanes Tael Lim, SE. MM/ Assesor SDAM Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
6	Stefanus Seo, S.Fil, MPA/Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDMD Provinsi NTT		
7	Yulius Lyberthus, SH/Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
<b>d. Pokja Penguatan Akuntabilitas</b>			
1	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas-tugas ketua tim penanggung jawab di area Penguatan Akuntabilitas;</li> <li>2. Melakukan koordinasi pendampingan kelompok kerja pada area Penguatan Akuntabilitas di unit kerja prioritas;</li> <li>3. Melakukan monev dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area Penguatan Akuntabilitas di unit kerja prioritas;</li> <li>4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas pada ketua tim Kerja.</li> </ol>

2	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si./Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan teknis Pelaksanaan Pembangunan ZI teknis area Penguatan Akuntabilitas kepada unit kerja prioritas ZI;</li> <li>2. Melakukan validasi data dukung pada area Penguatan Akuntabilitas dari unit kerja prioritas ZI;</li> <li>3. Membuat laporan hasil kerja dan melaporkannya kepada ketua Pokja;</li> <li>4. Membuat laporan hasil kerja dan melaporkannya kepada ketua Pokja.</li> </ol>
3	Kepala Sub Bagian Akuntansi Pendapatan Piutang dan Penerimaan Pembayaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
4	Yohanes Yetro Wenggo, SE/Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
5	Christina M. Agamitte, S.Sos, MM/P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
6	Margaritha J. Mesah/Pengadministrasi Umum Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
<b>e. Pokja Penguatan Pengawasan</b>			
1	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas-tugas ketua tim / penanggung jawab di area Penguatan Pengawasan;</li> <li>2. Melakukan koordinasi pendampingan kelompok kerja pada area Penguatan Pengawasan di unit kerja prioritas;</li> <li>3. Melakukan monev dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area Penguatan Pengawasan di unit kerja prioritas;</li> <li>4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas pada ketua tim Kerja.</li> </ol>
2	Yonas O. Manesi/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan teknis Pelaksanaan Pembangunan ZI teknis area Penguatan Pengawasan kepada unit kerja prioritas ZI;</li> <li>2. Melakukan validasi data dukung pada area Penguatan Pengawasan dari unit kerja prioritas ZI;</li> </ol>
3	Maria Edel Timu, SE/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
4	Jackson Alexander Manafe, S.KM/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		

5	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah NTT	Anggota	3. Membuat laporan hasil kerja dan melaporkannya kepada ketua Pokja.
6	Daniel Melkias Libing, S.STP/Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
<b>f. Pokja Pelayanan Publik</b>			
1	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas-tugas ketua tim / penanggung jawab di area Pelayanan Publik;</li> <li>2. Melakukan koordinasi pendampingan kelompok kerja pada area Pelayanan Publik di unit kerja prioritas;</li> <li>3. Melakukan monev dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area Pelayanan Publik di unit kerja prioritas;</li> <li>4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas pada ketua tim Kerja.</li> </ol>
2	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan teknis Pelaksanaan Pembangunan ZI teknis area Pelayanan Publik kepada unit kerja prioritas ZI;</li> <li>1. Melakukan validasi data dukung pada area Pelayanan Publik dari unit kerja prioritas ZI;</li> <li>2. Membuat laporan hasil kerja dan melaporkannya kepada ketua Pokja.</li> </ol>
3	Siman Halisi, AP.M.M./Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
4	Johanis Dominggus Kale/Analisis penatausahaan pada biro organisasi Setda prov. NTT		
5	Margaretha Olivia C. Djuma, S.Sos/ Analisis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
6	Agustinus Randyson, S.STP/Analisis Organisasi pada Biro Organisasi setda Prov. NTT		
7	Louisa Kristovera Lake, S.T/Ahli Pranata Komputer Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
<b>III. TIM PENILAI INTERNAL</b>			
1.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	<p>a. mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;</p> <p>b. membuat Rencana aksi/ Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>c. membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;</p> <p>d. menyosialisasikan proses pembangunan Zona Integritas kepada seluruh PD yang menjadi usulan/calon Pembangunan Zona Integritas;</p>
2.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. membangun koordinasi dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap seluruh kegiatan TPI untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemprov NTT;</p> <p>b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemprov NTT kepada ketua Tim Penilai Internal;</p>

3.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
4.	Yonas O. Manesi/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI);
5.	Ronald Philips Letor, STTP, MPA,/JF. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		b. melakukan Verifikasi data dukung terkait pelaksanaan internalisasi dan implementasi Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI):
6.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si./Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c. melakukan Validasi data dukung terkait pelaksanaan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI);
7.	Siman Halisi, AP.M.M./Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menyiapkan Berita Acara dan membuat laporan serta menyampaikan laporan penyelenggaraan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) kepada ketua TPI.
8.	Christina M. Agamitte, S.Sos, MM/P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
9.	Nifni Oktafia Sutriana Adu, S.AB/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
10.	Marsella Alpiony M. Bilik, S.Sos./Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
11.	Benyamin I. A. Balukh, S. Kom /JF. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
12.	Maria Edel Timu, SE/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		

13.	Jackson Alexander Manafe, S.KM/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
14.	Marsella Alpiony M. Bilik, S.Sos./Analisis Sumberdaya Aparatur Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 Pdt. SEKRETARIS DAERAH, 



**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19640110 198903 2 015